

Indonesia dan Perlombaan Senjata

TaJUK

Waspada! Jajanan Anak-anak

KASUS keracunan makanan sudah sering terjadi. Korbannya berbagai tingkatan umur. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sepanjang 2016 saja di Sumatera Barat ada lima peristiwa keracunan makanan massal, satu di antaranya minta korban. Teranyar adalah peristiwa yang terjadi di Nagari Batu Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Kamis (14/7) dengan 11 anak yang jadi korban.

Anak-anak di Matur itu keracunan setelah mengonsumsi bakso tusuk bakar. Mereka dilarikan ke Puskesmas Matur, tujuh lainnya dirujuk dan dalam perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi. Tiga korban dirawat di Puskesmas Matur dan satu lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisi sudah berangsur normal.

Penjual bakso telah diamankan di Polsek Matur untuk dimintai keterangan, sementara pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Agam juga telah mendatangi rumah penjual bakso untuk mengambil sampel makanan.

Polisi juga sudah menyita bakso bakar, saos dan kecap sebagai barang bukti untuk diuji labor. Setelah uji labor, baru bisa diketahui apakah dalam bakso bakar tersebut terdapat zat berbahaya. Bisa juga zat berbahaya ini terdapat dalam saos atau kecap.

Kalau terbukti ada zat berbahaya tentu sebuah kelalaian bagi pedagang bakso bakar itu dan tentunya berdampak hukum. Pedagang bakso bakar ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau kelalaiannya.

PEMBICARAAN resmi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Ryamizard Ryacudu, dan Menhan Federasi Rusia, Sergey Shoigu, di Moskwa medio April lalu membawa angin sejuk bagi upaya penguatan postur militer Indonesia.

Oleh:

Iwan Sulisty

Dosen pada Jurusan Hubungan Internasional (HI), FISIP

Universitas Lampung;

Pernah Mengajar di Jurusan Ilmu HI FISIP Unand dan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UNES, Padang

Dikabarkan, pertemuan itu mencakup rencana peningkatan kerja sama kedua negara di bidang militer. Juga, keinginan pemerintah Indonesia untuk membeli secara bertahap 10 unit pesawat tempur Sukhoi (Su-35).

Sebulan kemudian (19 Mei), pertemuan Presiden RI, Joko Widodo, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di kota Sochi, sebelah barat Rusia (di sela penyelenggaraan ASEAN-Russia Summit), tampaknya kurang memperjelas keinginan itu. Sebab, menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, keduanya tidak secara spesifik membahas pembelian tersebut, tetapi justru kerja sama pertahanan secara luas yang mencakup antara

senjata.

Untuk sementara, ia masih berupa "kompetisi persenjataan konvensional" yang tidak begitu keras dan sengit, namun dengan kadar yang 'cukup kritis'. Sebab, walaupun memang angka nominalnya bertambah secara konsisten sejak krisis ekonomi 1998, tetapi peningkatan rata-rata anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara tidaklah cepat dan drastis.

Bila pembelian oleh Indonesia itu terlaksana, dari segi *magnitude* (besaran)-nya, juga tidak fantastis dan hanya terfokus pada matra udara. Itu pun bukan dipicu oleh serangkaian konflik teritorial di tingkat kawasan yang tajam dan tidak nula disusul oleh



negara kuat (Singapura, Thailand, dan Malaysia). Artinya, kendatipun belum sanggup membeli peralatan militer dalam jumlah yang banyak, paling tidak, Indonesia tetap berupaya mempertimbangkan 'kesetaraan teknologi'.

Hingga kini, bila merujuk data *The Military Balance 2016*, dari segi besaran anggaran pertahanan, Singapura

logistik menghadapi ancaman bencana alam.

Semahal apapun biaya yang harus dialokasikan untuk bidang militer/pertahanan, ia terkait erat dengan harga diri sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat agar disegani dan tidak lagi dipandang remeh oleh negara-bangsa lain. Terlebih, hal itu akan selalu berhadapan dengan prio-

terhadap Vietnam. Dalam lima tahun mendatang, guna mengimbangi Vietnam, dengan besaran yang beragam, sejumlah negara kemungkinan besar juga akan memperkuat diri karena merasa terancam.

Dinamika di Kepulauan Natuna soal kapal ikan RRT beberapa waktu lalu akan dipandang sebagai salah satu motif Indonesia untuk mem-

kurang memperjelas keinginan itu. Sebab, menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, keduanya tidak secara spesifik membahas pembelian tersebut, tetapi justru kerja sama pertahanan secara luas yang mencakup antara lain *transfer of technology* dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perlombaan Senjata?

Rencana pembelian ini sendiri masih samar-samar. Namun, jika Su-35 jadi dibeli, apa dampaknya bagi pertimbangan kekuatan di Asia Tenggara? Kendati jumlahnya tidak begitu banyak, yakni sekitar 10 unit, apakah itu akan memunculkan *arms races* (perlombaan senjata) di tingkat kawasan?

Relatif sulit mengidentifikasi apakah penambahan persenjataan oleh suatu negara, entah dalam jumlah yang banyak atau sedikit, memang merupakan wujud respon terhadap penguatan kapabilitas pertahanan negara atau aliansi militer lain? Ataukah hal itu justru sekedar tindakan (*maintenance, routine modernization, build-up*) untuk 'menganamankan diri' karena memang sudah beberapa tahun tidak mempersenjatai-diri?

Bersandar pada pandangan Buzan dan Herring dalam *The Arms Dynamic in World Politics* (1998) bahwa perlombaan senjata merupakan suatu wujud ekstrem atas ragam tekanan yang kompleks yang kemudian mendorong suatu negara menambah kualitas dan kuantitas armada militernya, penulis berargumen, negara-negara di Asia Tenggara belum terlibat ke dalam perlombaan

nesia itu terlaksana, dari segi *magnitude* (besaran)-nya, juga tidak fantastis dan hanya terfokus pada matra udara. Itu pun bukan dipicu oleh serangkaian konflik teritorial di tingkat kawasan yang tajam dan tidak pula disusul oleh penggelaran senjata dalam jumlah yang signifikan di area tertentu yang menjadi sengketa.

Barangkali, spiral aksi-reaksi ini justru melibatkan negara-negara besar di luar kawasan, yaitu antara RRT, Rusia, dan AS, yang kebetulan saling berebut pengaruh, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

Secara taktis-strategis, pertahanan Indonesia layak-nya bertumpu pada dimensi laut mengingat ia adalah negara kepulauan yang luas. Karena itu, idealnya, fokus penguatan ialah pada kekuatan bahari, dengan tidak mengabaikan penguatan di matra udara dan darat. Bukankah saat dilantik, Presiden Widodo pun telah menegaskan bahwa "kita telah terlalu lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk"?

Memiliki armada militer yang tangguh adalah keharusan, utamanya untuk menganamankan wilayah kedaulatan serta kekayaan alam. Lagipula, di Indonesia terdapat tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan Selat Malaka, terpadat lalu-lintasnya (sekitar seperempat perdagangan maritim dunia).

Selama ini, dalam menghadapi kendala keuangan domestik, Indonesia menjaga *technological parity* (paritas teknologi) terhadap sejumlah

dalam jumlah yang banyak, paling tidak, Indonesia tetap berupaya mempertimbangkan 'kesetaraan teknologi'.

Hingga kini, bila merujuk data *The Military Balance 2016*, dari segi besaran anggaran pertahanan, Singapura masih yang terkuat (\$9,68 milyar, terlebih sebaran jumlah armada militer di matra darat, laut, dan udara), disusul oleh Indonesia (\$7,57 milyar), Thailand (\$5,37 milyar), dan Malaysia (\$4,74 milyar).

Sebagai negara kecil yang fasih dalam kalkulasi geopolitis dan geostrategis, Singapura akan selalu memantau dengan cermat setiap mur dan sekrup yang ditambahkan untuk memperkuat armada militer Indonesia.

Akan tetapi, manakala Indonesia tampak 'terlalu agresif' dalam memperkuat postur (modernisasi) militernya, maka sikap ini diyakini akan mengundang 'rasa tidak aman' bagi negara-negara tetangganya. Implikasinya, perlombaan senjata akan terjadi walaupun masih dalam 'kadar yang menengah' dengan spiral aksi-reaksi yang tidak begitu intens.

Persepsi Ancaman

Para petinggi militer maupun elite sipil di tingkat regional yang menangani persoalan pertahanan paham bahwa persepsi Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya perang di masa depan adalah kecil. Bahkan, hal itu disebutkan secara eksplisit di dalam Buku Putih Pertahanan RI tahun 2003 dan 2008. Alhasil, titik tekan selama ini ialah lebih pada alat angkut (kurang pada alat pukul) untuk distribusi

tuk bidang militer/pertahanan, ia terkait erat dengan harga diri sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat agar disegani dan tidak lagi dipandang remeh oleh negara-bangsa lain. Terlebih, hal itu akan selalu berhadapan dengan prioritas pembangunan di beberapa bidang lain yang juga dirasa penting dan mendesak, misalnya jalan raya, sarana pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, peningkatan anggaran pertahanan RRT serta kehadiran militernya beberapa kali di Laut Tiongkok Selatan niscaya akan memengaruhi persepsi para pemimpin di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN – termasuk para elite di Jakarta – dalam menganalisis lingkungan strategis untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan; khususnya dalam menghitung dengan cermat seberapa besar biaya yang mesti digelontorkan guna menangkal segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Dalam jangka-panjang, dua hal yang patut ditengarai menjadi embrio perlombaan senjata di Asia Tenggara ialah "penambahan kuantitas dan kualitas peralatan militer secara signifikan oleh Indonesia" serta "eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan yang kian memuncak". *The Military Balance 2016* sendiri bahkan menyatakan, Laut Tiongkok Selatan telah memicu Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Singapura mempertanggung instrumen militernya.

Hal krusial lain yang patut dicermati ialah pencabutan embargo persenjataan oleh AS

jumlah negara kemungkinan besar juga akan memperkuat diri karena merasa terancam.

Dinamika di Kepulauan Natuna soal kapal ikan RRT beberapa waktu lalu akan dipandang sebagai salah satu motif Indonesia untuk mempersenjatai-diri di tahun-tahun mendatang.

"Tacit Arms Races"?

Di sisi yang lain, semakin tinggi anggaran *Research and Development* (R&D) untuk bidang pertahanan dan penguatan industri militer, maka semakin besar pula kemungkinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat ke dalam pusaran perlombaan senjata berteknologi canggih secara diam-diam ("*tacit arms races*"), termasuk untuk kian mempertajam *precision guided munitions*.

Tidak ada mekanisme yang jitu dalam menangkis percaturan keras antarnegara-bangsa untuk terjerumus ke dalam lingkaran perlombaan ini. Variabel *military-industrial complex* kerap ikut serta.

Dialog antarpemimpin sipil dan militer serta patroli dan latihan militer bersama di sejumlah perairan strategis setidaknya akan meredam rasa curiga dan rasa tidak aman.

Lebih luas, di masa kini dan yang akan datang, Indonesia tidak dapat menghindari dari kerentanan/ancaman dan bahkan serangan terhadap perangkat sistem keuangan/perbankan, transportasi, serta sistem lainnya yang menunjang kepentingan nasional. Pada akhirnya, memperkuat strategi penangkalan dan pertahanan dalam *cyberspace* menjadi suatu keharusan. ***